

tahun 2015-2019 mengacu pada program dan kegiatan yang diterapkan dalam penyusunan RPJMN tahun 2015-2019 dan Renstra BPKP tahun 2015-2019. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L.

Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas dan Renstra BPKP tahun 2015-2019, Renstra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK berisi program, yaitu:

1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Program 06);
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program 01).

Program 01 bersifat generik antar K/L yaitu, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Program ini ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan oleh kedeputian. Baik program teknis pengawasan (Program 06) maupun program dukungan (Program 01) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh unit kerja atau satuan kerja di lingkungan BPKP.

Program Teknis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK adalah tunggal yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Program tunggal ini konsisten dengan eselonisasi tunggal di BPKP. Dalam rangka lebih menyelaraskan seluruh aktivitas sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing unit kedeputian, program indikatif dibagikan ke subprogram Pengawasan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Dari Program Pengawasan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK hasil restrukturisasi program dan kegiatan, yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dirumuskan 6 subprogram dengan uraian sebagai berikut:

1. Subprogram Pengawasan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* maupun *consulting* yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan opini atas Laporan Keuangan.
2. Subprogram Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* dan *consulting* yang berkaitan dengan peran Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan peran K/L dalam pengelolaan keuangan yang bersifat strategis, antara lain: penerimaan negara, alokasi anggaran, pengelolaan aset dan kekayaan negara.
3. Subprogram Pengawasan Pendidikan dan Kesehatan, serta Fokus Pembangunan Nasional Lainnya.
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* dan *consulting* yang berkaitan dengan pembangunan yang strategis yang memberikan aksesibilitas bagi masyarakat atas beberapa kebutuhan pelayanan dasar dan pengawasan strategis lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan perekonomian rakyat.
4. Subprogram Pembinaan SPIP Program Prioritas Nasional (Pendidikan dan Kesehatan serta Fokus Pembangunan Nasional Lainnya).
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* maupun *consulting* dalam membina terwujudnya efektivitas SPIP pada program lintas.
5. Subprogram Pembinaan SPIP K/L
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* maupun *consulting* dalam membina terwujudnya efektivitas SPIP pada K/L.
6. Subprogram Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* dan *consulting* yang berkaitan dengan pembinaan kapabilitas APIP K/L

baik pembinaan Jabatan Fungsional Auditor maupun tata kelola APIP.

Dari program dan sub program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon 2 yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk menjaga konsistensi nomenklatur perencanaan dan penganggaran, kegiatan pengawasan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK disesuaikan dengan nomenklatur yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan dari masing-masing eselon II teknis akan menghasilkan rekomendasi sebagai indikator kinerja pengawasannya. Rekomendasi dihasilkan melalui pelaksanaan komponen kegiatan, baik komponen teknis pengawasan dengan menggunakan berbagai alat (*tools*) pengawasan seperti audit, reuiu, evaluasi, pemantauan maupun komponen yang mendukung langsung kegiatan seperti penyusunan dan diseminasi pedoman, pemantauan pelaksanaan pengawasan, tabulasi dan lain-lain. Selain itu, terdapat pelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan kultur organisasi, penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan, penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung secara tidak langsung kegiatan teknis pengawasan. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan juga termasuk di dalamnya.

Konsisten dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran, terdapat 4 kegiatan pengawasan (program 06) dan 1 kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (program 01) di lingkungan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK, yaitu:

1. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan;
2. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

- Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara;
3. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 4. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam Lainnya;
 5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Deputy PIP Bidang Polhukam PMK.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dalam Tahun Anggaran 2017, Deputy PIP Bidang Polhukam PMK merencanakan akan melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Formulir RKT. Program dan kegiatan tersebut merupakan penetapan kinerja program Tahun 2017.

Pada tahun 2017, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra, perjanjian kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja yang memuat 3 indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tercapainya delapan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Deputy PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2017

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Reff. IKU Sasaran Strategis	TARGET 2017		Cara Pengukuran
			Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
1. Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional	1.1	%	55	Tindak Lanjut atas rekomendasi (Gabungan Prioritas Nasional dan Non Prioritas Nasional)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Reff. IKU Sasaran Strategis	TARGET 2017		Cara Pengukuran
			Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
2. Meningkatkan Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2.1 Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam dan PMK	2.1	%	29	Persentase Maturitas SPIP Level 3 dibandingkan dengan Populasi K/L Deputy
3. Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3.1 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 3)	3.1	%	21	Persentase Level 3 K/L IACM atas Populasi K/L di Deputy
	3.2 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 2)	3.1	%	52,25	Persentase Level 2 K/L IACM atas Populasi K/L di Deputy
	3.3 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 1)	3.1	%	27	Persentase Level 1 K/L IACM atas Populasi K/L di Deputy

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Penetapan Kinerja Tahun 2017 Deputy PIP Bidang Polhukam PMK, mencakup satu program utama yang harus diemban dalam pencapaian tujuan BPKP, yaitu **Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Melalui Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Polhukam PMK serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**.

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

Indikator kinerja utama Deputy PIP Bidang Polhukam PMK merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Deputy PIP Bidang Polhukam PMK dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP. Indikator-indikator kinerja utama Deputy PIP Bidang Polhukam PMK dengan target tahun 2017 Seperti Tabel 2.3 di atas.

III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Deputy PIP Bidang Polhukam PMK



Pengukuran capaian kinerja tahun 2017 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Deputy PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputy PIP Bidang Polhukam PMK). Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2017 dan membandingkan dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja 2017, realisasi kinerja tahun 2016 dan target yang diperjanjikan pada Renstra di tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Deputy PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2017 (revisi). Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, yaitu IKU kapabilitas APIP K/L level 1 dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian atas tiga IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama

URAIAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN					CAPAIAN KINERJA OUTCOME (%)
URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI		
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif					
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional					
1. Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita	Skala 1-5	2	3		150
Sasaran Program					
• Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional	%	55	83,33		151,52
Tujuan Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah					
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah					
2. 1. Maturitas SPIP K/L (Level 3)	%	29	22,22		76,62
Sasaran Program					
• Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam dan PMK	%	29	22,22		76,62
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten					
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemda					
3. 1. Kapabilitas APIP K/L (Level 3)	%	21	20,37		97
Sasaran Program					
• Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 3)	%	21	20,37		97
• Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 2)	%	52,25	48,15		92,15
• Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 1)	%	27	27,78		97,11

(untuk lebih lengkap, lihat lampiran 1)

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tujuan strategis dilakukan dengan mengukur sasaran strategis yang menjadi indikator dan terkait langsung dengan pencapaian tujuan strategis.

Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.

Analisis tentang capaian tiga tujuan strategis yang dijabarkan dalam tiga sasaran strategis yang ditetapkan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK disajikan sebagai berikut:

TUJUAN STRATEGIS 1:

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional akan bermuara pada pemberian informasi *assurance* dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif. Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan masyarakat dan *stakeholder* lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.

Tujuan tersebut menggambarkan peran Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara dan tata kelola pemerintahan yang baik, mengalami perbaikan melalui kegiatan *quality assurance* ataupun *consulting and assistance*.

Tujuan strategis adalah kondisi yang ingin dicapai dalam periode lebih dari satu tahun atau pada akhir masa renstra. Indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan

"Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif" adalah sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional".

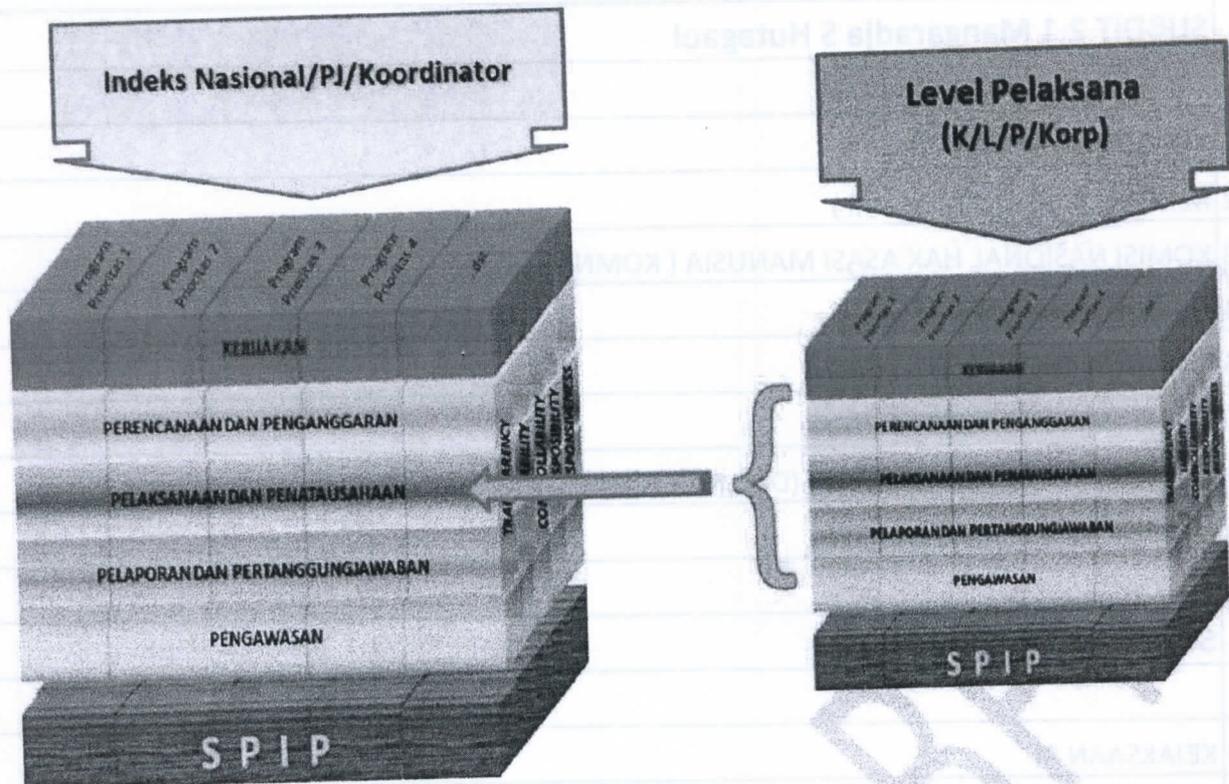
Analisis terhadap sasaran strategis yang ditetapkan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada awal masa Renstra, disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional" dilengkapi satu indikator kinerja yaitu "Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N)". Sasaran strategis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program teknis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional.

Indeks AP3N merupakan indeks untuk mengukur kualitas akuntabilitas pengelolaan program pembangunan nasional, yaitu apakah pengelolaan program pembangunan nasional tersebut telah dilaksanakan secara *transparent, liable, controllable, responsible, dan responsive*. Akuntabilitas pengelolaan program tersebut diharapkan mampu mengawal pencaaian tujuan program secara holistik, terintegrasi dan sinkron. Instrumen Indeks AP3N diukur secara berjenjang pada level pelaksana dan level koordinator yang menjabarkan karakteristik lintar sektoral dari program yang terlihat dari gambar berikut:



Gambar diatas menunjukkan bahwa kerangka pengukuran Indeks AP3N terdiri dari tiga komponen yaitu variable, dimensi, dan indikator dengan uraian sebagai berikut:

1. Variabel

Variabel menggambarkan pengelolaan program pembangunan nasional mulai dari kebijakan sampai dengan pengawasan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan Negara/ Daerah dari sisi proses terdiri atas variabel kebijakan; perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; pelaporan dan pertanggungjawaban; dan pengawasan.

2. Dimensi

Dimensi menggambarkan prinsip-prinsip akuntabilitas yang didasarkan dari prinsip-prinsip akuntabilitas menurut Koppel (2005), yaitu:

- a. *Transparency*: Keterbukaan atas pengelolaan program
- b. *Liability*: Kesiapan untuk menanggung konsekuensi atas performa pengelolaan program.
- c. *Controllability*: Kendali atas pengelolaan program oleh prinsipal.
- d. *Responsibility*: Regulasi, ketentuan, dan norma yang menjadi acuan

pertanggungjawaban pengelolaan program.

e. *Responsiveness*: Adanya atensi atas "needs and desires" dari konstituen program.

3. Indikator

Indikator secara umum merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan mengenai pelaksanaan suatu proses. Dalam konteks instrumen Indeks AP3N, indikator ini menunjukkan bahwa pelaku atau pelaksana program pembangunan telah menetapkan mekanisme tertentu yang memungkinkan terwujudnya akuntabilitas (*transparent, liable, controlable, responsible dan responsive*).

4. Skala Pengukuran Indeks AP3N:

Level	Skor	Predikat
1	0-40	Sangat Kurang Pengelolaan program pembangunan sangat kurang akuntabilitasnya, hampir seluruh area memerlukan perbaikan
2	41-55	Kurang Baik Pengelolaan program pembangunan kurang baik akuntabilitasnya, banyak area memerlukan perbaikan
3	56-70	Cukup Pengelolaan program pembangunan cukup akuntabilitasnya, beberapa area memerlukan perbaikan
4	71-85	Baik Pengelolaan program pembangunan baik akuntabilitasnya, namun perlu ada area tertentu yang memerlukan perbaikan
5	86-100	Sangat Baik Pengelolaan Program pembangunan sangat baik akuntabilitasnya, perlu dipertahankan atau ditingkatkan

5. Hasil pengukuran Indeks AP3N

a. Kegiatan Prioritas Program Indonesia Pintar (PIP)

Indeks AP3N	Variabel	Bobot Variabel	Skor Variabel	Dimensi Akuntabilitas	Skor Dimensi	Bobot Dimensi	Rata2 Skor Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8
64,00 (Level 3)	1 KEBIJAKAN	22%	0,093	Controllability	0,008	5%	0,167
				Responsiveness	0,050	5%	1,000
				Responsibility	0,010	4%	0,250
				Liability	0,000	3%	0,000
				Transparency	0,025	5%	0,500

2	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	25%	0,1150	Controllability	0,000	4%	0,000
				Responsiveness	0,025	5%	0,500
				Responsibility	0,010	4%	0,250
				Liability	0,000	4%	0,000
				Transparency	0,080	8%	1,000
3	PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN	15%	0,1216				
4	PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN	15%	0,120	Controllability	0,030	3%	1,000
				Responsiveness	0,030	3%	1,000
				Responsibility	0,040	4%	1,000
				Liability	0,000	3%	0,000
				Transparency	0,020	2%	1,000
5	PENGAWASAN	23%	0,190	Controllability	0,070	7%	1,000
				Responsiveness	0,050	5%	1,000
				Responsibility	0,040	4%	1,000
				Liability	0,000	3%	0,000
				Transparency	0,030	4%	0,750

b. Kegiatan Prioritas Program Keluarga Harapan (PKH)

Indeks AP3N	Variabel	Bobot Variabel	Skor Variabel	Dimensi Akuntabilitas	Skor Dimensi	Bobot Dimensi	Rata2 Skor Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	
59,55 (Level 3)	1	KEBIJAKAN	22%	0,093	Controllability	0,008	5%	0,167
					Responsiveness	0,050	5%	1,000
					Responsibility	0,010	4%	0,250
					Liability	0,000	3%	0,000
					Transparency	0,025	5%	0,500
	2	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	25%	0,1150	Controllability	0,000	4%	0,000
					Responsiveness	0,025	5%	0,500
					Responsibility	0,010	4%	0,250
					Liability	0,000	4%	0,000
					Transparency	0,080	8%	1,000
	3	PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN	15%	0,116				

4	PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN	15%	0,122	Controllability	0,030	3%	1,000
				Responsiveness	0,030	3%	1,000
				Responsibility	0,027	4%	0,667
				Liability	0,015	3%	0,500
				Transparency	0,020	2%	1,000
5	PENGAWASAN	23%	0,150	Controllability	0,070	7%	1,000
				Responsiveness	0,050	5%	1,000
				Responsibility	0,000	4%	0,000
				Liability	0,000	3%	0,000
				Transparency	0,030	4%	0,750

Dengan demikian hasil penilaian untuk Program Pembangunan Nasional yang dinilai akuntabilitasnya adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Prioritas	Indeks AP3N	Kebijakan		Perencanaan-Penganggaran		Pelaksanaan-Penataa usahaan		Pelaporan-Pertanggung jawaban		Pengawasan	
			Bobot	Skor	Bobot	Skor	Bobot	Skor	Bobot	Skor	Bobot	Skor
1.	Program Indonesia Pintar (PIP)	64,00	22%	0,093	25%	0,1150	15%	0,1216	15%	0,120	23%	0,190
2.	Program Keluarga Harapan (PKH)	59,55	22%	0,093	25%	0,1150	15%	0,116	15%	0,122	23%	0,150
	Nilai/Angka Rata-rata	61,775 (Lvl. 3)	22%	0,093	25%	0,1150	15%	0,1188	15%	0,121	23%	0,170

Perbandingan target dan realisasi target kinerja tahun 2017 sebagai berikut:

No	URAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional				
1)	<i>Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita</i>	Skala 1-5	2	3	150%

Sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional" dihasilkan melalui pencapaian sasaran program "Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan".

Sasaran program "Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan"

merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi *assurance* atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping *consultancy* sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. BPKP bertekad untuk berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019.

Pengukuran indeks AP3N yang dilakukan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK baru dapat dilakukan di level kegiatan prioritas. Idealnya, pengukuran seyogyanya dilakukan pada level program prioritas atau level yang lebih tinggi yaitu prioritas pembangunan nasional. Terdapat perbedaan yang signifikan terkait pengukuran Indeks Akuntabilitas tahun 2016 dan Indeks AP3N yaitu dalam metodologi pengukurannya. Apabila Indeks Akuntabilitas menggunakan empat parameter yang berasal dari data sekunder yaitu opini laporan keuangan, nilai SAKIP, nilai SPIP dan nilai kapabilitas APIP, maka indeks AP3N menghususkan pada pengukuran indeks atas pengelolaan program pembangunan nasional dengan metode survei (data primer). Oleh karena perbedaan metodologi tersebut, perbandingan indeks tahun 2017 dan 2016 tidak dapat dilakukan.

Sasaran Program: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sasaran strategis tersebut didukung oleh satu sasaran program, yaitu "Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan" yang dilengkapi satu indikator kinerja yaitu "Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional" yang diukur dengan menghitung persentase

tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan.

Realisasi indikator kinerja sasaran program "Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional" tahun 2017 sebesar 83,33% atau mencapai 151,52% dari target periode yang sama sebesar 55%.

Realisasi sebesar 83,33% merupakan 25 tindak lanjut perbaikan yang terjadi atas 30 rekomendasi yang disampaikan. Perbaikan yang telah dilakukan sebagai dampak dari pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan antara lain:

1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Capaian B12 Tahun 2016 dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan capaian program dan kegiatan Prioritas Nasional oleh Kantor Staf Presiden (KSP) kepada Presiden.
2. Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV Tahun Anggaran 2016, Triwulan I dan II serta Tender Pra DIPA TA 2017 oleh APIP K/L/P dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh Presiden.
3. Kemensos mengembangkan dan menerapkan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yaitu sistem yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, berdasarkan profil dalam Basis Data dan menghubungkan mereka dengan program-program pusat dan daerah, yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
4. Kementerian sosial mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang menghimpun basis data terpadu yg terus di *update* oleh Pusdatin, Kemensos RI. SIKS-NG digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi data penerima program BPNT, KIS dan PKH untuk penerima program tahun 2018.
5. Kemenag telah memanfaatkan hasil verifikasi BPKP sebagai dasar pembayaran tunggakan Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS (Inpassing) Kementerian Agama Tahun 2015 s.d. 2016.
6. Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga sehingga proses perencanaan telah sesuai dengan prioritas RKP, dialokasikan secara efisien, efektif